

BLU-PIP MAGAZINE Journey



Membangun Semangat **GENERASI MUDA BERWIRAUSAHA**

BERANDA

Gerilya Penyaluran
Pembiayaan UMI

EDUKASI

Mendorong BUMDes Jadi Ujung
Tombak Pemberdayaan Masyarakat

INSIGHT

Pelaku UMI Intip Peluang Bisnis
di Tahun Politik

Selamat hari
SUMPAH PEMUDA

28 Oktober

SOEMPAH PEMOEDA.

Pertama : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA
MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE,
TANAH INDONESIA.

Kedoea : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA
MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE,
BANGSA INDONESIA.

Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA
MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN,
BAHASA INDONESIA.



Berpihak ke UMi

Pelindung
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penasihat
Ismed Saputra

Pemimpin Redaksi
Mas Soeharto

Redaksi
Jony Afandi, Tonny WP, Ary Dekky Hananto,
Adnan Agung Nugraha, Adhita Surya Permana,
R Adi Pengayoman

Desain Grafis
Melviana Angraini

Setelah Deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, satu tekad membunyah di dalam dada setiap warga negara. Persatuan dan nasionalisme untuk saling mendukung menjadi sebuah arah yang disepakati bersama.

Langkah saling mendukung antar anak bangsa termasuk dengan cinta buatan Indonesia. Gerakan yang mendapatkan payung hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menerjemahkan gerakan ini dalam aksi nyata. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan, Bangga Buatan Indonesia dijewantahkan menjadi Membumi (Membeli produk buatan pelaku usaha ultra mikro UMi).

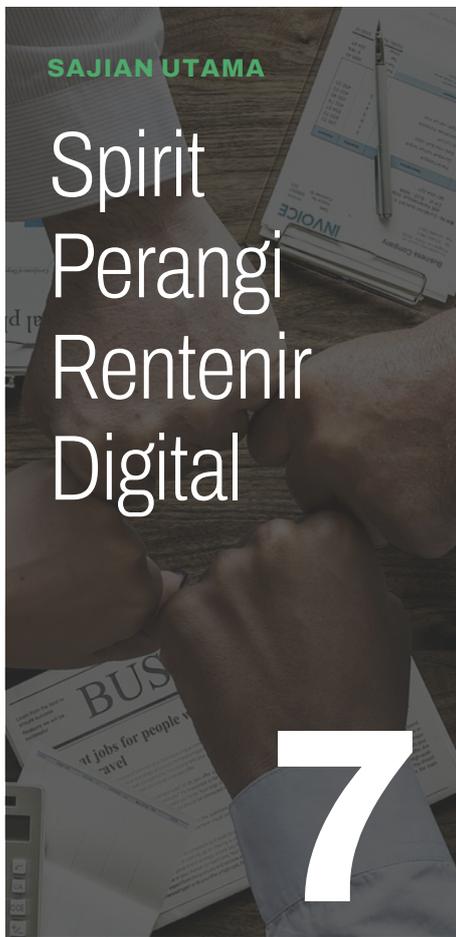
Gerakan Membumi sebagai bagian dari semangat nasionalisme ini digencarkan bersamaan dengan peran peningkatan akses pembiayaan para pengusaha baru. Terutama dari kelompok marginal yang sebelumnya mendapat bantuan sosial (bansos).

Dengan plafon pinjaman maksimal Rp20 juta per orang, segmen *non-bankable* dan *underserved* menjadi kelompok utama yang terus dilayani. Bukan hanya dukungan modal, langkah strategis ini juga bagian dari upaya pemerintah memberi proteksi agar para pelaku usaha kecil tidak terjerat pinjaman ilegal seperti rentenir, bank keliling, maupun pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Selain peran nyata PIP dalam memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda, edisi kali ini juga mengulas harapan wakil menteri keuangan atas peran mendorong agar pelaku UMi terus naik kelas.

Secara bersamaan juga disampaikan tentang perluasan mitra penyalur. Langkah ini termasuk dengan upaya menggandeng sejumlah pemerintah daerah.

PIP pada periode ini juga menyelenggarakan pelatihan Training of Trainers (ToT) untuk penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Pelatihan ini hasil kerja sama Pusat Investasi Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia.



SAJIAN UTAMA

Spirit Perangi Rentenir Digital

7



UANG KITA

Menekan Kemiskinan, *Stunting*, Kesenjangan Lewat APBN 2024

30



LAYANAN

Pemanfaatan E-Learning, Jalan Memperluas Pembelajaran Bagi UMKM

28



SELINTAS

UMi Youthpreneur 2023: Kamukah yang Terpilih?

32



INSIGHT

Pelaku UMi Intip Peluang Bisnis di Tahun Politik

35

DAFTAR ISI

5	Sajian Utama	26	Infografik
11	Beranda	28	Layanan
15	Bedah Unit	30	Uang Kita
18	Tren Investasi	32	Selintas
20	Profil	33	Insight
22	Edukasi	37	Tips



Klik pada halaman yang dituju



Unduh versi PDF

GELORA MEMBUMI PIP

dalam Semangat Bangga Buatan Indonesia



Sumpah Pemuda. Ikrar yang diproklamlirkan pemuda-pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut menggambarkan semangat persatuan dan nasionalisme yang kuat di antara pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang etnis. Semangat persatuan dan nasionalisme ini pula yang kemudian menjadi akar penting tercetusnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Gerakan ini menjadi salah satu mandat yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Gernas BBI, terutama, menggarisbawahi pentingnya mencintai dan mendukung produk-produk Indonesia serta menciptakan kemandirian ekonomi negara. Sebagaimana Sumpah Pemuda pada 1928, salah satu tujuan dari Gernas

BBI adalah membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia.

“Jika 270 juta rakyat Indonesia bangga, mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia, maka akan membantu menekan defisit transaksi berjalan, akan membuat industri kreatif nasional berkembang cepat dan pesat,” terang Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Gernas BBI, segenap *stakeholder* baik di bawah

pemerintah maupun swasta dapat melakukan sederet peran.

“Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi,” tulis Presiden Jokowi dalam keputusannya.

Dan sebagai salah satu lokomotif pemacu denyut pelaku usaha mikro di Indonesia, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan pun turut andil.

Pada sisi hulu, misalnya, PIP memainkan peran dengan cara mempermudah akses pembiayaan sekaligus melakukan pelatihan untuk para pelaku usaha ultra mikro.

Peran pertama dilakukan PIP dengan meluncurkan fasilitas pembiayaan khusus pelaku usaha ultra mikro (UMi) dengan plafon maksimal Rp20 juta per orang.

Fasilitas ini, khususnya, menysar pelaku usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan, alias segmen *non-bankable* dan *underserved*.

Kehadiran fasilitas pembiayaan PIP juga bukan semata-mata untuk mempermudah syarat pelaku usaha UMi mendapat modal. Tetapi juga sebagai proteksi agar para pelaku usaha kecil terhindar dari pinjaman ilegal seperti rentenir, bank keliling, maupun pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Kemudian, terkait peran kedua di sisi hulu, yakni pelatihan untuk pelaku usaha ultra mikro, dilakukan PIP dengan tidak kalah sungguh-sungguh. Salah satu kesungguhan ini misalnya terlihat dari program pembekalan matang terhadap para pendamping debitur.

Sejak awal, PIP agresif melakukan *training of trainers* (ToT) untuk para pendamping. Pelatihan ini dilengkapi *project based learning*, sehingga materi pendampingan langsung dipraktikkan kepada debitur.

“Bentuk kegiatan dukungan itu berupa pemberian motivasi

Bangga Buatan Indonesia pada sisi hilir dengan meluncurkan Membumi (Membeli Buatan UMi)

Gerakan massif ini terdiri dari pembukaan akses pasar hingga melakukan kurasi untuk tampil di etalase khusus untuk produk-produk debitur. Etalase ini salah satunya berbentuk Pop Up Store yang dibuka di kawasan pusat perbelanjaan Sarinah.

Di luar lokasi itu pun, PIP juga konsisten memperkenalkan produk-produk lokal karya pelaku usaha mikro di berbagai ajang atau event khusus.

“PIP berpartisipasi dalam kegiatan Sarinah Injourney tanggal 24-26 Oktober 2023. Dalam program ini juga berlangsung kurasi produk. Dengan partisipasi PIP, diharapkan memperluas peluang pemasaran debitur UMi,” ulas Ismed.

Sebagai konteks, pada 2022 lalu PIP telah menyalurkan pembiayaan kepada 2,01 juta debitur dengan Rp8,1 triliun. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan target pada 2021, yakni 2 juta debitur. Sementara itu secara kumulatif sejak 2017-2022, pembiayaan telah disalurkan kepada 7,4 juta debitur dengan nilai yang digulirkan sekitar Rp26,2 triliun.

Tahun ini pun, PIP mencanangkan realisasi pembiayaan kembali menjamah 2,2 juta debitur dari Januari-Desember 2023. Target ini, sekali lagi, menegaskan komitmen PIP untuk meneruskan estafet semangat Sumpah Pemuda yang berkesinambungan.

“

Jika 270 juta rakyat Indonesia bangga, mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia, maka akan membantu menekan defisit transaksi berjalan, akan membuat industri kreatif nasional berkembang cepat dan pesat.

Presiden Jokowi

”

usaha, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur dan sebagainya. Pada 2022, kegiatan dukungan itu terbagi menjadi empat yakni pelatihan, promosi, pemberdayaan dan inkubasi usaha,” papar Direktur Utama PIP Ismed Saputra.

Tidak berhenti di situ, selain peran-peran di sisi hulu, PIP juga membantu Gerakan Nasional

SPIRIT PERANGI RENTENIR DIGITAL dengan UMi



Maraknya fenomena pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terjerat rentenir hingga pinjaman *online* (pinjol) ilegal menjadi sebuah dilema.

Di satu sisi, fenomena tersebut menggarisbawahi betapa literasi keuangan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini membuat banyak pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memilah mana akses pendanaan yang sesuai dan legal.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLIK) OJK 2022 memang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dari survei sebelumnya. Tetapi,

bila dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan yang sudah mencapai 85,10%, angka ini masih amat jauh tertinggal.

Atas minimnya literasi tersebut, para pelaku usaha juga tidak dapat disalahkan. Bagaimanapun, bujuk rayu rentenir dan pinjol ilegal memang sukar diabaikan begitu saja. Apalagi, layanan-layanan ini kerap menawarkan iming-iming syarat mudah dan proses pencairan dana cepat.

Pemahaman soal aspek dilema terakhir inilah yang, kemudian, melandasi semangat PIP untuk terus memperluas akses pendanaan Ultra Mikro (UMi).

Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, masyarakat yang membutuhkan modal usaha dapat menghubungi lembaga penyalur yang bekerjasama.

Syarat yang diperlukan pelaku usaha kecil pun lebih mudah bila dibandingkan rentenir hingga pinjol.

Tepatnya, syarat utama adalah calon debitur memiliki KTP atau KTP elektronik serta tidak sedang menerima kredit dari program pemerintah lain, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program ini juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari perempuan hingga generasi muda.

SAJIAN UTAMA

“Penerima Pembiayaan UMi agregat sejak 2017 sampai dengan pekan ketiga Oktober, sebanyak 9,23 juta orang dengan nominal pembiayaan Rp33,93 triliun,” kata Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf ditemui di Jakarta, Jumat (27/10).

Adapun, dari jumlah tersebut sekitar 14,85% pembiayaan disalurkan kepada pengusaha muda dengan rentang usia 20-29 tahun. Tepatnya ada 1,36 juta pengusaha muda dengan jumlah penyaluran Rp4,78 triliun sejak 2017.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda Staf Divisi Kerjasama Pendanaan PIP Taufiq Iskandar menambahkan kriteria yang mendapat dukungan modal dengan pinjaman adalah seseorang yang punya usaha produktif.

Tak berhenti pada syarat, fasilitas bunga yang ditawarkan PIP pun lebih akomodatif dan ringan untuk para pelaku usaha mikro. Sebagai contoh, pada pembiayaan UMi melalui Pegadaian misalnya, tenor pinjaman dengan pembayaran bulanan terdiri dari 12, 18, 24, 36 bulan dengan bunga *flat* 1,12% per bulan.

Kemudian, tenor dan bunga untuk sekali bayar terdiri dari tenor 3 bulan dengan bunga 6%, tenor 4 bulan sebesar 8% dan tenor 6 bulan sebesar 12%.

Sementara itu, ada pula tenor bulanan yang mencakup angsuran 3 bulanan (12, 18, 24, 36 bulan), angsuran 4 bulanan (12, 24, 36 bulan) dan angsuran 6 bulan (12, 18, 24, 36 bulan). Angsuran 3 bulanan dikenakan bunga 3,86%, angsuran 4 bulanan sebesar 5,47% dan angsuran 6 bulan sebesar 9,17%.

Saluran yang bisa dijangkau para pelaku usaha ultra mikro pun tidak susah dijangkau. Sebab, Pegadaian sebagaimana disebut dalam ilustrasi barusan bukanlah satu-satunya mitra penyalur pembiayaan UMi.

Pembiayaan PIP UMi juga disalurkan lewat sejumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain. Per 14 Juni 2023, PIP mencatat telah terdapat 73 LKBB yang menjadi penyalur pembiayaan UMi.

PIP juga memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha UMi. Dalam hal ini, PIP memberikan pendampingan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk.

Selain itu, PIP turut memberikan pelatihan teknis usaha atau produksi, pembukuan keuangan

usaha, *branding* produk, dan pemasaran *online*. PIP juga memberikan promosi atau pemasaran produk melalui sosial media PIP, *marketplace*, lelang produk *online*, pameran produk *offline*, gerai UMi di pusat perbelanjaan, dan publikasi melalui media massa.

“Kami juga memberikan pemberdayaan berbasis komunitas dan terintegrasi pada sektor pertanian dan produk kerajinan,” kata Taufiq.

Pelaku usaha ultra mikro, sebagai bagian dari ekosistem UMKM, adalah salah satu dinamo penting bagi pertumbuhan Indonesia.

Pada akhirnya, semangat PIP untuk membantu pelaku usaha ultra mikro adalah cermin dari semangat Sumpah Pemuda pada 1928 yang menginspirasi persatuan dan semangat untuk memajukan bangsa.

Seperti perjuangan para pemuda pada masa lalu yang ingin melihat Indonesia merdeka dan maju, PIP juga ingin melihat pelaku usaha kecil di Indonesia mendapatkan akses yang lebih baik.

Sehingga, UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negeri.

PEMBIAYAAN UMI

Tenor	Bunga	Tenor	Bunga	Tenor	Bunga
	1 X BAYAR		BAYAR 3 BULANAN		BAYAR 6 BULANAN
3 bulan	3 bulan	12 bulan	3,86%	12 bulan	9,17%
4 bulan	4 bulan	18 bulan	3,86%	18 bulan	9,17%
6 bulan	6 bulan	24 bulan	3,86%	24 bulan	9,17%
	BAYAR BULANAN	36 bulan	3,86%	36 bulan	9,17%
12 bulan	1,12%		BAYAR 4 BULANAN		
18 bulan	1,12%	12 bulan	5,67%		
24 bulan	1,12%	24 bulan	5,67%		
36 bulan	1,12%	36 bulan	5,67%		

Urun Peran PIP MEMBANGKITKAN KEMAMPUAN GENERASI MUDA

Pemuda-pemudi di Indonesia pada dasarnya masih mewarisi api semangat membara dari para pendahulu-pendahulunya. Termasuk dalam hal memajukan bangsa lewat penguatan denyut perekonomian.

Buktinya, survei World Economic Forum (WEF) pada 2019 menunjukkan bahwa pemuda berusia 15-35 tahun di Indonesia memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha.

Sayangnya, sejauh ini masih ada tantangan serius untuk mengonversi semangat tersebut menjadi tindakan nyata. Sebab,

mayoritas warga generasi di Indonesia masih terlampau khawatir mengambil risiko untuk berbisnis.

Saat ini, jumlah pengusaha muda di Indonesia ditaksir berbagai lembaga baru berada di kisaran 3,4% dari populasi total. Angka ini masih tertinggal, misalnya, bila dibandingkan rasio

di negara tetangga seperti Malaysia (5%) hingga Singapura (7%).

Salah satu aspek yang menjadi kekhawatiran utama, bila dibedah, adalah ketersediaan akses permodalan. Sebab, generasi muda lazimnya cenderung memiliki kekuatan finansial yang lebih lemah dibandingkan kalangan yang lebih tua.

Sebagai salah satu kepanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan akses modal untuk usaha ultra mikro, PIP pun menyadari tantangan tersebut. Oleh karenanya, upaya untuk memacu partisipasi pemuda-pemudi di Indonesia agar merealisasikan ide bisnis masing-masing juga makin diseriisi.

Pada 2022 dan 2023 ini misal, PIP konsisten mengelat ajang UMi Youthpreneur. Kegiatan ini terdiri dari serangkaian pelatihan, berikut kompetisi ide bisnis yang khusus menyasar kawula muda.

Proposal bisnis yang memenangkan kompetisi kemudian akan mendapat hadiah berupa akses permodalan dan juga pelatihan khusus dari PIP.

Tentu saja, tidak semua peserta bisa keluar sebagai pemenang. Namun lebih dari itu, makna kegiatan ini bukan sekadar menang dan kalah. Tetapi juga untuk menempa mental para peserta yang gagal agar tidak ragu melakukan introspeksi untuk memperbaiki dan merealisasikan gagasan bisnis mereka.

“Saat gagal bukan berarti berhenti tetapi harus memperbaiki dan meningkatkan kapasitas diri agar nantinya dapat berhasil sesuai dengan cita-cita yang diharapkan,” ujar Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto.

Adapun, selain lewat UMi Youthpreneur, PIP juga mengupayakan komitmen mendorong penetrasi jumlah pebisnis muda dengan terus memperluas sosialisasi program pembiayaan dan pelatihan.

Di sisi sosialisasi, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan PIP Goes to Campus. Kegiatan pengenalan bisnis bagi mahasiswa ini menyasar ribuan peserta pada berbagai kampus di Indonesia.

Selain itu, PIP juga terus memperluas pembiayaan dan pelatihan untuk memastikan jangkauan debitur makin luas hingga ke segmen yang lebih muda.

Sejauh ini, buahnya tidak kalah ranum. Per pertengahan Juni 2023, mayoritas segmen debitur

“

Saat gagal bukan berarti berhenti tetapi harus memperbaiki diri agar nantinya dapat berhasil sesuai dengan cita-cita yang diharapkan

Mas Soeharto

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP

”

penerima pembiayaan PIP UMi memang masih kalangan berusia 40-49 tahun, yakni sebanyak 31%. Kemudian, disusul debitur pada usia 30-39 tahun pada rentang 27%.

Namun demikian, jumlah kategori berusia lebih mudah juga tidak kalah banyak. Tepatnya, PIP telah memiliki debitur muda berusia 20-29 tahun sebanyak 14%.

Tak cuma itu, kualitas pembiayaan macet atau *non-performing loan*

(NPL) juga masih amat rendah. Ini mengindikasikan bahwa para debitur, termasuk debitur-debitur muda PIP memiliki resiliensi yang *solid* dalam menumbuhkan bisnis dan menuntaskan kewajibannya.

Untuk terus menjaga ketangguhan tersebut, Direktur PIP Kemenkeu Ismed Saputra menjanjikan lembaga yang dia pimpin akan terus meningkatkan efektivitas dan kualitas pendampingan.

Upaya itu dilakukan dalam bentuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan kualitas pendampingan, dan

penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) bagi para pendamping, yang dilengkapi pola *project based learning*, sehingga materi pendampingan langsung dipraktekkan kepada debitur.

“Bentuk kegiatan dukungan itu berupa pemberian motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur dan sebagainya. Pada 2022, kegiatan dukungan itu terbagi menjadi empat yakni pelatihan, promosi,

pemberdayaan dan inkubasi usaha,” papar Ismed.

Dengan berbagai upaya dan komitmen yang telah dijalankan oleh PIP, semangat Sumpah Pemuda tetap menjadi pendorong utama bagi generasi muda Indonesia. Meskipun tantangan dalam pemberdayaan pemuda sebagai pengusaha masih ada, PIP terus berupaya untuk menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan motivasi yang diperlukan.

GERILYA PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI

dari Tangerang Hingga ke Malang

Setelah menjangkau hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terus melanjutkan gerilya penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) ke berbagai komunitas pelaku usaha baru. Strategi menggandeng sebanyak mungkin lembaga penyalur dijalankan. Terkini, tiga lembaga telah disetujui menjadi perpanjangan tangan PIP untuk menyalurkan pembiayaan UMi.

Lembaga penyalur UMi terbaru itu adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Benteng Mikro Indonesia di Tangerang, Banten, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Baitul Mandiri di Cianjur, Jawa Barat, dan Koperasi Jaya Karya Abadi di Kota Malang, Jawa Timur.

Penandatanganan akad PIP dengan KSPPS Benteng Mikro Indonesia dilakukan pada 23 Agustus 2023 dengan total nilai

Rp150 miliar. Adapun, dengan KSP Karya Baitul Mandiri, penandatanganan akad dilakukan pada 22 Agustus 2023 dengan plafon Rp22,5 miliar.

Jumlah penyaluran yang telah dilakukan KSP KBM sampai dengan 31 Juli 2023 adalah Rp33,7 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 3.435 orang. Selanjutnya, pada 8 September 2023, PIP menyalurkan pembiayaan UMi senilai Rp7,5 miliar kepada koperasi Jasa Karya Abadi Kota Malang.

“Penyaluran dana ini diharapkan mampu membuat masyarakat level ultra mikro bisa mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, mudah, dan aman,” kata Ismed Saputra, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah.

Secara kumulatif sejak 2017 hingga semester I/2023, pembiayaan UMi yang telah digelontorkan PIP sebesar Rp30,9 triliun untuk 8,55 juta debitur melalui 72 lembaga keuangan bukan bank, serta telah menjangkau 509 kota/kabupaten.

Dari realisasi pembiayaan UMi secara kumulatif tersebut, Pulau Jawa berkontribusi sebanyak 5,53 juta debitur dengan nilai pembiayaan Rp19,55 triliun.

Secara khusus, Jawa Timur telah menyumbang 1,7 juta debitur dengan nilai pembiayaan Rp6 triliun.

PIP pada tahun ini juga melakukan penambahan sebanyak 16 produk UMi, sehingga secara total menjadi 49 produk pembiayaan UMi yang ditawarkan kepada penyalurnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ismed mengatakan pihaknya menysasar pembiayaan yang tidak tersentuh perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya. Pembiayaan ultra mikro memiliki risiko tinggi sehingga tidak semua lembaga finansial bersedia masuk ke sektor tersebut.

“Kalau yang lain pasti mencari yang aman dari risiko termasuk perbankan. Kalau yang kami pinjamkan ini, pasti yang punya risiko,” kata Ismed.

Untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha, pemerintah pun menysasar pembiayaan ultra mikro.

“Kira-kira begitu, pemerintah masuk ke sektor yang tidak disentuh,” imbuhnya.

Adapun, pinjaman yang disalurkan PIP kepada pelaku usaha mikro paling banyak Rp20 juta. Namun mayoritas masyarakat mengajukan pinjaman Rp2,5 sampai Rp5 juta untuk usaha kecil.

Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto, mengatakan selain pinjaman, pihaknya melakukan pendampingan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program pendampingan oleh penyalur.

“Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan kualitas pendampingan, dan penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) bagi para pendamping, yang dilengkapi pola *project based learning*, sehingga materi pendampingan langsung dipraktikkan kepada debitur,” tutupnya.

“ Penyaluran dana ini diharapkan mampu membuat masyarakat level ultra mikro bisa mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, mudah, dan aman ”

Ismed Saputra, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah

SOLID DUKUNG UMI

LKMS Mahirah

Muamalah Ajukan

Pencairan Tahap Kedua

PT LKMS Mahirah Muamalah makin solid dalam menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro (UMi) untuk wilayah Aceh. Setelah disetujui menjadi penyalur UMi pada Juni 2022 lalu, kini perusahaan mengajukan pencairan tahap kedua ke Pusat Investasi Pemerintah untuk disalurkan kembali kepada mitra.

Muffed Al Kamal, Direktur LKMS Mahirah Muamalah berharap persetujuan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bagi pihaknya untuk menyalurkan pembiayaan UMi tahap kedua menjadi pendorong pelaku usaha mikro naik kelas. Kucuran dana dari PIP diharapkan akan semakin memudahkan UMKM dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengakses modal usaha.

Penandatanganan pencairan pinjaman dari PIP ke LKMS Mahirah untuk tahap kedua dilakukan pada akhir Agustus 2023 lalu. Hadir dalam penandatanganan tersebut Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf dan Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah T. Hanansyah.

Wali Kota Banda Aceh kala itu Aminullah Usman mengatakan kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam menghidupkan usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau perbankan.

“Karena pada bank, kita tahu mereka lebih fokus pada (pembiayaan) besar-besar saja. Tapi bagaimana kakek-kakek yang jual ikan, ibu-ibu yang jualan sayur-sayuran, ini mereka kesulitan modal, dan dengan adanya kerja sama dengan PIP dalam bentuk UMi ini, dapat terbantu mereka,” katanya.

Penyaluran pembiayaan di wilayah Aceh tidak hanya melalui LKMS Mahirah Muamalah.





Penandatanganan PIP dan PT LKMS Mahirah Muamalah

Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2023, PIP juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dalam rangka penyaluran pembiayaan UMi. Hadir dalam penandatanganan tersebut Pj. Bupati Aceh Ajaya Nurdin.

Program UMi untuk wilayah Provinsi Aceh sendiri telah menjangkau kurang lebih 133.896 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp491,29 miliar. Khusus wilayah Kabupaten Aceh Jaya, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau sebanyak 12.378 Debitur UMi dengan total penyaluran sebesar Rp47,493 Miliar.

Kehadiran PIP di Aceh juga diharapkan dapat membantu mengembangkan BUMDes/ BUMDesa melalui pendampingan. Modalitas yang diberikan kepada BUMDes/BUMDesa Bersama ke depan, juga diharapkan

tetap terjaga sehingga program pembiayaan UMi dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Nurdin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan program bantuan pasca bencana tsunami yang menggunakan metode *cash forward*. Program ini dinilai telah memberikan dampak ketergantungan masyarakat kepada program bantuan, sehingga tata kelola ekonomi wilayah Aceh Jaya dipercaya sulit untuk mencapai kemandirian.

Di sisi lain, pemerintah melalui Keputusan Presiden sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk program pembiayaan di wilayah Aceh. Meskipun demikian, para pengusaha ultra mikro di wilayah Aceh Jaya yang sebagian besar berusaha dagang dan pertanian, memerlukan program pembiayaan yang dapat mengkomodir kebutuhan mereka.

Pemkab Aceh Jaya sudah memiliki BUMDesa Bersama yang siap melayani masyarakat Ultra Mikro wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

“Saat ini BUMDesa Bersama sudah dibentuk untuk menaungi 172 desa dan (saat ini) memiliki pendanaan sebesar Rp 17 Miliar. Uang yang ada dapat digunakan sebagai *collateral* sehingga dapat pembiayaan lebih besar (bagi BUMDes Bersama)”, ungkap Nurdin.

Nurdin berharap melalui kerja sama ini, terdapat pembinaan terhadap LKBB syariah di Kabupaten Aceh Jaya baik itu BUMDesa Bersama atau BUMD dengan mengemban prinsip efisiensi. Ia berharap adanya sinergi penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan target pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.



Gandeng Pemda, PIP PERLUAS JANGKAUAN UMI

Kolaborasi membesarkan pelaku usaha mikro (UMi) dilakukan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dengan menggandeng seluruh lapisan. Tidak hanya memperbanyak lembaga penyalur, kolaborasi dengan pemerintah daerah baik gubernur, bupati atau wali kota terus ditingkatkan. Tujuannya, lebih banyak pelaku UMi yang dapat berkolaborasi untuk naik kelas serta terhindar dari jerat rentenir.

Dua di antara upaya untuk kian dekat dengan pemerintah daerah

yakni *launching* Program Literasi UMi Amanah, Melayani, Berakhlak, dan Optimis (AMBO) di Sumatra Barat, serta akses UMi dengan menggaet Pemerintah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Tanah Datar, Sumatra Barat, Eka Putra menyampaikan bahwa *launching* ini momen yang sangat dinantikan sebagai upaya memerangi rentenir di kawasan tersebut.

"Kami sudah coba dengan Program Unggulan Makan Rendang atau maksimalkan memberantas rentenir agar hilang di Tanah Datar

dengan bantuan modal usaha kepada pedagang dan UMKM. Namun, itu masih ada kendala dengan BI *checking* terkait subsidi bunga 5% dari pemda. Saat ini, datang program UMi Ambo yang akan lebih memudahkan dengan dikerjasamakan seperti dengan Koperasi dan Bumrag yang ada di nagari tanpa BI *checking*," ujarnya.

UMi Ambo, lanjut Eka, sejalan dengan program unggulan menciptakan wirausaha baru serta meminimalisir pengangguran yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Di Tanah Datar ada 75 nagari, 74 Bumrag dan 15 di antaranya sudah berbadan hukum, 58 koperasi non KPN, sehingga dengan di-*launching*-nya UMi Ambo ini akan sangat bermanfaat untuk membantu UMKM terlebih yang terlilit rentenir,” kata Eka.

“Inilah solusi yang diberikan Kemenkeu RI dan Pusat Investasi Pemerintah, dari Saya sampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi sehingga ke depannya rentenir bisa hilang dari Tanah Datar,” jelasnya.

Tahun ini, lanjut Eka, pihaknya ingin mencoba menerapkan program memberantas rentenir yang melibatkan 5 koperasi dan 5 Bumrag yang ada di Tanah Datar.

“Kami menerima PKH sekitar 15.000 orang. Kami berharap para penerima PKH ini bisa menjadi pelaku UMKM, pengusaha di Tanah Datar berkat bantuan modal dari Umi Ambo dan akan kita sinergikan dengan nama Umi Ambo Makan Rendang,” pungkas Bupati Eka Putra.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menjelaskan saat ini total UMKM di Sumbar mencapai 593.100 unit yang terdiri dari, usaha mikro sebanyak 531.350 unit (89,59%), usaha kecil sebanyak 53.431 unit (9,01%) dan usaha menengah sebanyak 7.900 unit (1,33%).

“Kami berharap program UMi AMBO ini bisa tersosialisasi secara masif, agar bisa dinikmati secara menyeluruh karena lebih dari setengah penduduk Sumbar itu, bergerak di sektor usaha mikro,” katanya.

Sementara itu, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, PIP memperluas akses pembiayaan UMi dengan menggandeng pemerintah daerah. Pihak yang dilibatkan dalam kerja sama ini yakni Pemerintah Daerah Lombok Timur, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (Refi) dan KSP Permata Siaga.

Sama halnya dengan tujuan dari UMi AMBO, kerja sama ini juga untuk membatasi akses masyarakat ke rentenir.

“Selanjutnya, kami berharap akses pembiayaan ke masyarakat ini bisa

“

Inilah solusi yang diberikan Kemenkeu RI dan Pusat Investasi Pemerintah, dari Saya sampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi sehingga ke depan rentenir bisa hilang di Tanah Datar.

Eka Putra

Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat

”

lebih luas lagi jangkauannya. Kami berharap bisa melanjutkan eksekusi ini karena ini luar biasa sekali,” kata Direktur Utama PIP Ismed Saputra.

Selain itu, dia juga meminta kepada Bupati Lombok Timur NTB HM Sukiman Azmi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menerima pembiayaan dari PIP di Lombok Timur.

“Nah, nanti untuk pendampingan dan pembinaan semuanya dari Pemkab langsung,” katanya.

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmi menjelaskan pihaknya sempat bekerja sama dengan PIP untuk bangun pasar tradisional Masbagik dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp34,35 miliar beberapa tahun lalu.

Dari pinjaman sebesar Rp34,35 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mendapatkan keuntungan dari HGB dan HPL.

“Dari hasil itu kami bisa mendapatkan keuntungan dari HGB dan HPL itu dari sekitar Rp34,350 miliar jadi Rp46 miliar. Kemudian, pasar itu kini dikelola dengan baik sampai sekarang,” tuturnya.

Dia juga berharap agar kerja sama antara Pemkab Lombok Timur dan PIP tidak berhenti setelah dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati.

Sementara itu, Presiden Direktur Refi, Iman Pribadi mengatakan bahwa ada banyak tantangan yang kini dihadapi oleh Refi di antaranya mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi dan melakukan literasi digital.

“Tahun ini kami memang ada penurunan untuk penyaluran karena ada perubahan yang cukup besar yaitu dari model bisnis yang kini semuanya sudah digital,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat yang ingin meminjam dana harus mendaftarkan dirinya melalui ponsel pintar, namun hal tersebut cukup sulit dilakukan mengingat masih banyak warga yang ingin pencairan dana secara langsung atau tunai.

“Ternyata mendigitalisasi itu tidak mudah, jadi dari Refi kita tetap konsisten dan tetap fokus kepada sektor riil dan literasi digitalisasi,” tuturnya.

Debitur UMi Ikut Tampil Dalam Ajang INTERNASIONAL AFMGM



Sejumlah debitur pembiayaan ultra mikro (UMi) dengan dukungan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berpartisipasi dalam rangkaian acara 10th Asean Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang berlangsung pada 22-25 Agustus 2023 di Jakarta.

Dalam pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral Asia Tenggara itu, produk-produk yang telah dikurasi PIP ditampilkan untuk memukau pengunjung. Dalam acara ini nasabah UMi PIP menampilkan ragam tas buatan tangan, sabun alami, produk fesyen dari kain asal Indonesia, kerajinan ukiran kayu, dan kerajinan tangan lainnya.

Adapun, debitur UMi yang turut berpartisipasi adalah Gegaen Lima Craft, Senja, Z&T Craft, Redsoga Ecoprint, Apasaja Gallery, dan Batik Tulis Sidomulyo.

Keenam UMKM tersebut merupakan debitur UMi yang telah beberapa kali menerima pembiayaan. Karya-karya mereka juga telah malang melintang di berbagai acara dengan fasilitasi oleh PIP.

Pada pertemuan 10th AFMGM, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyempatkan untuk berkeliling melihat pameran produk UMKM Indonesia, termasuk produk milik para debitur UMi.

“Salah satunya, yakni tas dari serat pelepah pisang kreasi (*brand* lokal bernama) Z&Tcraft yang juga menarik perhatian pasar Eropa,” kata Menkeu.

Selain itu, yang juga menarik perhatian Menkeu adalah kerajinan dari limbah kertas buatan Gegaen Lima, *handmade home decor* dari limbah plastik buatan Mortier, koleksi rajutan lucu dari Pingwen Handcraft, dan produk lainnya.

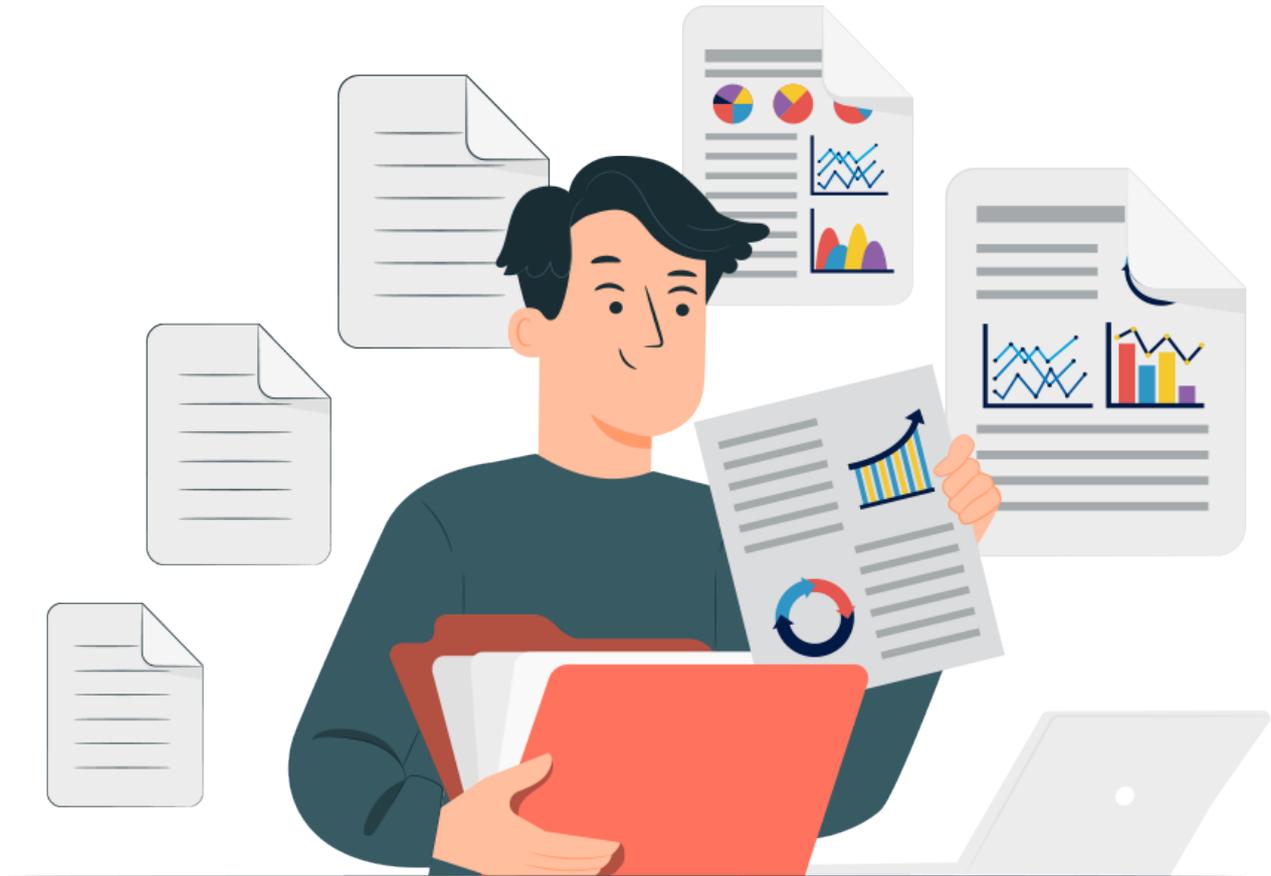
“Saya juga sempat mencicipi Kopi Puntang si ‘Juara Dunia’ asli dari

Jawa Barat racikan Third Wave Coffee. Rasanya memang sesuai julukannya. Juara,” katanya.

Sri Mulyani berpesan agar masyarakat Indonesia juga bersama-sama turut mendukung UMKM Indonesia dengan bangga mewakili produk lokal.

“Ayo terus dukung UMKM, bangga pakai produk asli Indonesia. UMKM tumbuh, Indonesia maju,” katanya.

Keterlibatan debitur UMi dalam acara tersebut sejalan dengan fokus pemerintah untuk menopang keberlangsungan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional dan regional. Pada 1st AFMGM di Bali pada akhir Maret lalu, misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan adanya peta jalan untuk memperkuat kerangka kerja Asean dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM.



Menginvestasikan Kembali **KEUNTUNGAN HASIL USAHA**

Dalam mengelola keuangan usaha, keuntungan yang diterima tidak sepenuhnya digunakan kembali sebagai modal kerja. Ada kalanya untung tersebut dibagi menjadi dividen atau bisa juga diinvestasikan ke instrumen keuangan lainnya sebagai diversifikasi portofolio modal. Salah satu manfaat utama dari investasi adalah dapat

membantu pelaku usaha mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan investasi pada hasil keuntungan ini, pelaku usaha dapat memperoleh imbal hasil sesuai dengan portofolio investasi yang dipilih.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan berinvestasi adalah:

1. Pertumbuhan Modal

Melalui investasi, nilai uang yang ditanamkan akan meningkat lebih besar dari modal awal. Dengan cara ini, investor berharap mendapatkan keuntungan dari investasi mereka dengan cara meningkatkan nilai aset atau mendapatkan pengembalian yang menguntungkan. Investasi yang cerdas dapat membantu perusahaan tumbuh lebih cepat dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk ekspansi.

Dengan memahami manfaat dari investasi, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan perusahaan mereka dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Investasi yang tepat dapat memberikan perlindungan finansial dan pertumbuhan yang stabil untuk usaha UMKM.

Karena itu, beberapa investasi yang dapat dipilih, di antaranya:

1. Deposito

Deposito adalah suatu produk perbankan untuk menempatkan sejumlah dana dalam rekening bank untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap yang telah disepakati sebelumnya.

Deposito sering disebut sebagai "time deposit" karena dana tersebut ditempatkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Keunggulan dari produk ini adalah risiko rendah, serta tingkat bunga tetap yang dapat memberikan keuntungan yang konsisten. Namun, kelemahannya adalah adanya pajak sebesar 20%

2. Pendapatan Pasif

Investasi bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Misalnya, ada dana *idle* yang belum akan digunakan dalam waktu dekat. Dengan menginvestasikan dana *idle* tersebut, maka bisa menghasilkan arus kas yang stabil, misalnya dalam bentuk bunga/kupon. Ini dapat memberikan aliran pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai operasional bisnis atau menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga.

atas keuntungan yang diperoleh, dan dana tidak dapat ditarik kapan saja karena terdapat jangka waktu tetap mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun atau lebih.

2. Rekening Giro

Rekening bank ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan sehari-hari. Rekening ini biasanya digunakan oleh individu, perusahaan, sampai organisasi untuk menyimpan dan mengelola dana yang digunakan dalam aktivitas harian mereka

Keunggulannya terletak pada likuiditas tinggi, di mana dana dapat ditarik kapan saja jika dibutuhkan, serta keamanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, kelemahannya adalah tidak ada potensi *return*, sehingga nilai uang akan tetap sama.

3. Mencapai Tujuan Keuangan

Investasi bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan keuangan dalam mengelola sebuah usaha. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah menambah modal untuk meningkatkan keuntungan atau melakukan ekspansi, dengan menyisihkan sebagian keuntungan dan mengalokasikannya ke investasi, perusahaan akan semakin siap dalam mencapai tujuan tersebut. Investasi yang bijak dapat membantu perusahaan mengumpulkan modal tambahan untuk mencapai target pertumbuhan mereka.

3. Reksa Dana

Reksa dana adalah paket investasi yang dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi (MI) dan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, MI akan berinvestasi ke berbagai macam instrumen investasi. Siapapun bisa berinvestasi di reksa dana tanpa terkecuali, termasuk sebagai seorang pengusaha yang mengelola sebuah bisnis.

Keunggulannya mencakup potensi keuntungan, tidak menjadi objek pajak, bisa dicairkan saat dibutuhkan, dan tidak ada penalti. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko, termasuk reksa dana, tetapi risiko ini dapat diminimalkan dengan memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko yang dimiliki.

Wamenkeu Suahasil:

PEMBIAYAAN UMI MENJANGKAU BERAGAM JENIS USAHA



Dukungan kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) tidak berhenti kepada faktor kredit. Peran pendampingan bisnis dan pembukaan akses pasar menjadi kunci agar kelompok UMi dapat mengalami peningkatan kualitas.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa pembiayaan UMi berperan penting dalam mendukung masyarakat dalam meningkatkan skala usahanya. Langkah yang sangat dibutuhkan setelah sebelumnya pelaku usaha UMi terdampak keras oleh pembatasan akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah menugaskan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMi. PIP akan mengkoordinir dukungan pembiayaan bagi kelompok bisnis kecil ini agar naik kelas melalui dukungan lembaga penyalur. Tujuannya, pembiayaan UMi yang diberikan pemerintah melalui PIP menjadi titik awal kebangkitan kembali perekonomian masyarakat.

Saat mengunjungi nasabah UMi, Sri Hartarty, pengelola toko kerajinan kain sasirangan di Sungai Jingah, Banjarmasin, Kalimantan

Selatan pada awal Oktober, dia menekankan tentang pentingnya pola pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Dia menyebutkan nasabah UMi yang menerima penyaluran pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) itu telah mampu menambah variasi produk, seperti kain, kemeja, gaun, kerudung, hingga mukena. Pesanan ke tokonya pun naik hingga ratusan setiap bulan, berkat adanya dukungan modal kerja.

Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa pembiayaan UMi sangat membantu masyarakat dalam

mengembangkan usahanya, termasuk untuk pulih dari pandemi Covid-19. UMi memberikan pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah, dengan syarat nasabah itu tidak sedang menerima kredit lainnya dari program pemerintah.

“[Penyalur] harus terus membina kluster kelompok ultra mikro dan membantu pemasaran produk binaannya,” ujar Wamenkeu Suhasil.

Seperti diketahui, pembiayaan UMi bukan hanya berupa pemberian pinjaman modal, tetapi terdapat pula pendampingan bagi nasabah. Petugas dari pihak penyalur akan membantu nasabah untuk mencatat keuangan dalam usahanya, mengelola keuangan, meracik ide kemasan dan produksi, hingga memasarkan produknya.

Dalam kesempatan mengunjungi nasabah pembiayaan ultra mikro (UMi) di Lampung, Suhasil juga menyebut pembiayaan yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui PIP menjadi sarana untuk menumbuhkan usaha mikro di berbagai daerah.

“UMi adalah kredit usaha mikro yang diberikan pemerintah pusat dengan seluruh penyalurannya langsung dapat diakses oleh kelompok usaha kecil di seluruh daerah,” ujar Suhasil.

Ia mengatakan melalui kredit UMi, pemerintah berharap bisa menciptakan usaha mikro kecil baru dan produk baru. “Sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terjadi dengan merata karena semua bisa mengakses permodalan dengan mudah,” katanya.

Penyaluran UMi ini dilakukan melalui berbagai macam sarana

seperti Pegadaian, koperasi, dan perbankan. “UMi ini level pinjamannya bahkan bisa Rp10 juta tidak memerlukan agunan terlalu besar, dan dapat dikerjakan secara berkelompok sehingga ibu-ibu bisa berkelompok dan membuat usaha bersama untuk mendapatkan permodalan dari kredit UMi tersebut,” ucapnya.

Menurut dia, selain memfasilitasi akses permodalan melalui UMi pihaknya pun terus melakukan pembinaan kepada UMKM di daerah untuk meningkatkan kapabilitas, hingga memfasilitasi untuk ekspor.

“Kami juga membantu dari segi memberi pelatihan, pengetahuan sampai memfasilitasi ekspor sehingga UMKM di daerah salah satunya di Provinsi Lampung ini produknya dapat dikenal secara global,” tambahnya.





PIPEDUKASI KOPERASI DI DEPOK Untuk Jadi Lembaga Penyalur

Kawasan penyangga ibu kota yang memiliki banyak pelaku usaha mikro (UMi) seperti wilayah Depok menjadi fokus Pusat Investasi Pemerintah untuk ditopang perekonomiannya. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Depok, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengenalkan manfaat UMi kepada sejumlah koperasi di wilayah pinggir Jakarta ini.

Dalam sosialisasi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat itu, sejumlah pengurus koperasi dari seantero Depok itu hadir dalam acara tersebut dan menyimak penjelasannya dengan seksama.

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko PIP Imaduddin menjelaskan bahwa pengenalan program kepada koperasi di wilayah Depok bertujuan agar para pengurus koperasi yang hadir memahami program pembiayaan UMi. Termasuk mendorong koperasi sebagai lembaga penyalur.

“Program pembiayaan bagi UMi ini dari pemerintah pusat langsung untuk pelaku UMKM, tapi kami akan bekerja sama dengan koperasi di Depok dalam menyalurkan pembiayaannya ke debitur (pelaku UMKM),” ujar Imaduddin.

PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga badan layanan umum ini memiliki tugas untuk

menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha ultra mikro. Dalam menyalurkan pembiayaan itu, PIP bekerja sama dengan sejumlah lembaga penyalur, termasuk koperasi.

Dalam kesempatan itu, PIP menjelaskan bahwa koperasi yang menjadi mitra penyalur UMi dapat memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah ultra mikro sesuai kebutuhan nasabah. Tenor pinjaman pun terbilang singkat, tetapi bunganya rendah.

Koperasi yang hendak menjadi mitra penyalur PIP juga harus berpengalaman dalam menyalurkan dana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama dua tahun.

Berbeda dengan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman lainnya, pembiayaan UMi mewajibkan penyalur, dalam hal ini koperasi untuk memberikan pendampingan kepada nasabah UMi. Pendampingan itu berupa pengembangan produksi

dan kemasan yang menarik, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran produk.

Pengenalan program dan sosialisasi kepada pihak koperasi menjadi penting karena nantinya mereka yang akan memberikan pendampingan kepada debitur UMi.

“Kami berharap dari 30 koperasi yang ikut sosialisasi ini, di antaranya ada yang bisa bergabung menjadi penyalur pembiayaan ini,” ujar Imaduddin.

Kepala Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok Bambang Supoyo menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama dengan PIP dalam pembiayaan UMi tersebut.

“Menurut saya ini sangat membantu para pelaku usaha ultra mikro dan juga koperasi. Maka, DKUM akan sangat mendukung program PIP karena akses permodalan ini yang diharapkan para pelaku usaha,” ujar Bambang.



MENDORONG BUMDES

Jadi Ujung Tombak Pemberdayaan Masyarakat



Desa sebagai administratif terkecil dalam pemerintahan memiliki kemampuan sebagai penggerak perekonomian terkuat. Untuk itu, elemen ekonomi dalam masyarakat terkecil itu perlu ditingkatkan kapasitasnya termasuk bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan keberadaan BUMDes dapat membantu menggerakkan perekonomian pedesaan untuk lebih cepat.

“BUMDes memiliki potensi yang besar untuk memajukan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Sebab, dengan optimalisasi BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada menjadi suatu yang bermanfaat,” ujar Luky dalam pembukaan *workshop* pemberdayaan desa dan usaha desa sebagai bentuk dukungan bagi perekonomian masyarakat. Acara ini digelar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Siliwangi (LP2M Unsil) akhir Agustus 2022 lalu.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Mandala Unsil, Tasikmalaya pada Jumat (25/8/2023) itu, terdapat lebih dari 250 pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Banjar turut serta dalam lokakarya tersebut.

“Makanya kami minta pemerintah desa rajin menginvestasikan sebagian dana desa untuk BUMDes. Namun, ada studi kelayakan dulu biar investasi yang ditanam menguntungkan dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Lucky.

Rektor Unsil Nundang Busaeri menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memacu geliat BUMDes di Priangan Timur. Dukungan itu di antaranya dalam bentuk tata kelola produksi, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran.

“Kami ucapkan kasih kepada Kemenkeu yang mempercayai Unsil untuk bekerja sama dalam mendorong optimalisasi BUMDes itu,” ujar Nundang.

Tim Unsil bersama Kemenkeu akan melakukan pendampingan terhadap 50 BUMDes yang tersebar di wilayah Priangan Timur.

Pihak Unsil meyakini bahwa *civitas* akademiknya berkompeten dalam membantu BUMDes yang terseleksi untuk menjadi lokus untuk mendapatkan pendampingan.

“Kami berharap ini dapat memacu perekonomian masyarakat sampai ke tingkat terluar, selepas *workshop* ini nanti ada tim dari Unsil dan Kemenkeu yang diterjunkan guna mendampingi 50 BUMDes yang tersebar di Priangan Timur,” ujar Nundang.



Menjadi Penyalur UMi, **BEBAS BIAYA DAN TRANSPARAN**

Pusat Investasi Pemerintah membuka kesempatan seluasnya bagi lembaga keuangan untuk menjadi penyalur.

Para penyalur pembiayaan bagi pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) ini dapat berbentuk koperasi ataupun lembaga keuangan bukan bank lainnya.

Kolaborasi menjadi jalan bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjangkau UMKM lebih banyak lagi. Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang menysasar kemandirian usaha pelaku ekonomi masyarakat lapisan terbawah.

Pelaku usaha ini belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu, PIP pun membuka kesempatan secara terbuka bagi lembaga keuangan untuk menjadi penyalur.

Dalam penetapan penyalur pembiayaan UMi, PIP melakukannya secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun alias 0 rupiah. Adapun, terdapat enam persyaratan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro sesuai Perdirut PIP nomor PER-10 tahun 2020, yakni:

1. Berstatus lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
2. Memiliki pengalaman pembiayaan UMKM min.2 tahun
3. Sehat dan berkinerja baik (NPL <5% dan Gearing ratio <10%)
4. Memiliki sistem yang terkoneksi dengan SIKP Umi (*Upload* atau *host to host* dan dibuktikan dengan Berita Acara Acceptance Test (UAT)
5. Memiliki kapasitas pendampingan kepada Debitur
6. LK *audited* minimal WDP atau LK hasil pemeriksaan pengawasan dan disetujui anggota

PROSEDUR MENJADI PENYALUR UMI BERSAMA PIP

01

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mengajukan menjadi penyalur kepada PIP. Pengajuan dapat dilakukan secara *online* melalui e-proposal.umi.id

02

PIP menganalisis permohonan dan memutuskan dalam rapat komite.

03

Penerbitan Keputusan Dirut PIP tentang penetapan sebagai penyalur.

DOKUMEN PERSYARATAN:

01

Surat pernyataan direktur utama/pimpinan LKBB untuk mengikuti tata kelola pembiayaan ultra mikro

+

02

Proposal menjadi penyalur

+

03

Dokumen dan atau informasi pendukung

+

04

Surat pernyataan kebenaran dokumen

Pemanfaatan E-learning, Jalan Memperluas Pembelajaran bagi UMKM



Platform pembelajaran digital atau *e-learning* menjadi salah satu sarana penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kapasitasnya. Platform itu terus diperkenalkan dan digunakan secara luas oleh UMKM di Tanah Air.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM. Pemerintah menginisiasi sejumlah program agar UMKM dapat mengikuti proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas.

Pengembangan platform *e-learning* juga menjadi salah satu fokus pemerintah, karena platform itu memungkinkan UMKM di seluruh penjuru negeri untuk mempelajari berbagai hal mengenai bisnis. Materi-materi terkait bisnis dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan mudah melalui gawai.

Airlangga menilai bahwa platform *e-learning* menjadi sangat penting karena saat ini UMKM berjumlah lebih dari 64,2 juta usaha dan kontribusinya terhadap PDB telah lebih dari Rp9.500 triliun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui *e-learning* menjadi sangat penting.

“Pemerintah akan terus mendukung UMKM sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial,” ujar Airlangga.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan juga turut mendorong pemanfaatan platform *e-learning* secara luas kepada para debiturnya.

Platform *e-learning* sangat bermanfaat karena dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) oleh PIP, para pelaku usaha tidak sekadar mendapatkan dukungan dana. Terdapat pendampingan dari petugas terlatih kepada para pelaku UMi untuk mengembangkan usahanya.

Selain pendampingan secara langsung, PIP juga mendorong para pelaku usaha UMi untuk mempelajari berbagai hal mengenai usaha dan bisnis melalui platform *e-learning*.

Salah satu modul *e-learning* dari Kementerian Keuangan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik

terdapat di tautan <https://linktr.ee/belajarumkm>.

Dalam tautan itu terdapat panduan untuk mengikuti *e-learning* dasar-dasar pengelolaan UMKM juga untuk mempelajari materinya secara langsung.

Lalu, terdapat lima modul untuk pembelajaran mikro (*microlearning*) yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM dan UMi.

Kelima modul itu adalah Microlearning Pemasaran Digital Produk UMKM, Microlearning Legalitas atau Perizinan UMKM, Microlearning Pembiayaan UMKM, Microlearning Pelaporan Keuangan UMKM, dan Microlearning Perpajakan UMKM.

Platform pembelajaran atau *e-learning* tersebut dapat menjadi salah satu referensi dan sumber belajar bagi para pelaku UMKM dan UMi untuk mendalami dasar-dasar pengelolaan usaha, sehingga usahanya bisa berkembang dan naik kelas.



Menekan Kemiskinan, *Stunting* dan Kesenjangan Lewat APBN 2024

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang akan diimplementasikan di masa depan bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional yang telah ditetapkan termasuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“P erlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” terang Presiden Jokowi.

Termaktub dalam RUU APBN 2024 bahwa tingkat kemiskinan

ekstrem ditargetkan pada rentang 0% hingga 1%. Angka ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menarget tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0%.

Di tahun terakhir periode jabatannya, Presiden Jokowi juga menarget prevalensi *stunting* turun ke level 14%.

Sebagai konteks, tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 berada di level 1,74%. Sedangkan, prevalensi *stunting* per akhir 2022 ada di level 21,6%, dan diekspektasikan melorot lagi ke level 17% pada akhir 2023.

Menurut Presiden, menekan sebisa mungkin angka tingkat

kemiskinan dan *stunting* merupakan aspek krusial. Bukan saja dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5% dan inflasi rendah, tapi juga untuk memastikan kesenjangan sosial maupun ekonomi kian berkurang.

“Asumsi selalu kita upayakan serealistik mungkin. Itu yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun, pada 2024 mendatang, pemerintah memasang asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Kemudian, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8% dan rata-rata nilai tukar rupiah bergerak sekitar Rp15.000 per US\$.

Rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi 6,7%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US\$80 per barel, serta *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Sesuai arahan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memfokuskan anggaran untuk menekan kemiskinan dan ekstrem.

“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan *stunting* menuju 3%.

Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan. Khususnya melalui implementasi berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.

Menkeu juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk *tax holiday*, *super deduction* untuk *research*, untuk vokasi, dan juga *tax allowance* dalam rangka

“ Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental. ”

PRESIDEN JOKOWI

mendukung berbagai transformasi industri.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan *tax ratio* yang terus meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional.

“Dan untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16% hingga 2,64% dari PDB dengan *primary balance* mendekati 0,” pungkas Sri Mulyani.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah melihat target yang dipatok pemerintah telah memasang target dan indikator dan realistis.

Said juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk makin fokus memerangi kemiskinan, sebab ini merupakan mandat konstitusi.

“Karena itu, tiada hal yang pantas kita berikan kecuali sepenuhnya mendukung pihak yang hendak melunasi janji,” papar Said.

Di samping indikator yang telah disebutkan, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat memasang beberapa indikator target lain.

Misalnya, tingkat pengangguran terbuka akan diupayakan dalam rentang 5% hingga 5,7%. Indeks Pembangunan Manusia 2024 diharapkan bisa mencapai 73,99 hingga 74,02 atau sedikit berada di atas target APBN 2023.

Terakhir dan tidak kalah penting, pemerataan dan ketimpangan yang diukur dalam indeks Gini Rasio ditargetkan berada di level 0,374-0,377, serta indeks Nilai Tukar Petani di kisaran 105-108 dan Nilai Tukar Nelayan 2024 bisa mencapai 107-110.

UMI YOUTHPRENEUR 2023

Kamukah yang Terpilih?

Menciptakan semakin banyak pengusaha muda tangguh menjadi pendorong utama gelaran UMi Youthpreneur oleh Pusat Investasi Pemerintah. Pada penyelenggaraan 2023 ini, seleksi telah memasuki tahap presentasi peserta terpilih.

Terlaksana pada 26-28 Oktober 2023 di Jakarta, PIP telah mengumpulkan para pengusaha muda dengan ide bisnis penuh terobosan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia.

Ada 15 proposal yang terpilih dari total 756 ide bisnis pengusaha muda. Beberapa yang terpilih di antaranya NaNaRe asal Surabaya, yang merupakan kemasan ramah lingkungan dari rumput laut.

Kemudian ada platform jasa layanan lelang ikan *online*, Bidfish asal Balikpapan. Ada pula olahan minyak jelantah untuk lilin hingga karya seni bahan limbah kayu sungai dan akar pohon.

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf mengatakan banyak aspek yang menjadi pertimbangan untuk

menyeleksi peserta. Termasuk potensi menciptakan lapangan pekerjaan baru, isu keberlanjutan lingkungan, dan aspek digitalisasi serta pengembangan teknologi.

“Kami utamakan usaha-usaha yang akan dibangun akan berdampak ke lingkungan sekitar, apakah menciptakan lapangan pekerjaan baru, apakah bisa menggandeng orang-orang di sekitar untuk menjadi *supply chain* untuk *supply* bahan baku,” kata Yusuf di Jakarta, akhir Oktober lalu.

Yusuf berharap apa yang para pengusaha muda lakukan menjadi pendorong perekonomian secara makro, meskipun berangkatnya dari skala kecil. Namun secara nasional akan teragregasi dengan perekonomian yang lebih luas.

Dalam acara UMi Youthpreneur 2023, peserta mendapatkan

pembekalan untuk menyusun proposal usaha dan mengajarkan mereka untuk menyampaikan ide usaha dalam sebuah *pitching session*.

Mereka kemudian mempresentasikan ide bisnis mereka di depan para juri. Nantinya dari ada enam yang keluar menjadi pemenang, mereka akan mendapatkan pembiayaan, pendampingan, serta pengawasan perkembangan usaha dari tim pendamping langsung PIP.

“Kami juga tetap akan mengikutsertakan [9 peserta lainnya] dalam berbagai event yang kami adakan meskipun rekan-rekan tidak terpilih untuk menerima *award* karena kita menghargai ide dan semangatnya,” tandas Yusuf.

Pelaku Mikro Terbukti Patuh Bayar Pinjaman

Nasabah ultra mikro terbukti mampu menjaga kepercayaan atas kredit tanpa agunan yang diberikan. Tercatat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan membukukan rasio kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) di level terendah.



Direktur Utama PIP Ismed Saputra menjelaskan bahwa hingga akhir Agustus 2023, PIP mencatatkan rasio NPL 0,1%. Artinya, dari seluruh pembiayaan yang disalurkan, hanya 0,1% yang terkendala cicilannya dari debitur.

Apabila melihat data 7 tahun terakhir, tepatnya pada kurun 2017–2022, rasio NPL PIP konsisten berada di bawah 1%. Pada kurun 2017–2019 PIP mencatatkan NPL di level 0%, lalu pada 2020 dan 2021 menjadi 0,03%, kemudian pada 2022 menjadi 0%.

“NPL kami termasuk rendah karena di dalam penyaluran kami bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank [LKBB], koperasi, lalu ada BUMN, lembaga keuangan mikro dan memang risiko itu di-*sharing*,” ujar Ismed di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Tingkat NPL memang dapat bergerak seiring makin besarnya total pembiayaan yang disalurkan dan semakin banyaknya jumlah debitur. Namun, Ismed terus berharap dan berupaya rasio kredit macet PIP dapat terjaga di level terendah.

“Kalau ada yang macet nanti masih tanggungan dari LKBB yang menyalurkan,” ungkapnya.

Selain menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi), PIP juga mendorong kelembagaan LKBB, yakni LKM dan koperasi, untuk melakukan pendampingan kepada para debitur sebagai bentuk pengembangan usaha mikro.

“Karena usaha ultra mikro ini kalau tidak ada pendampingan, sakit saja bisa nggak bayar, makanya lembaga-lembaga itu kami dorong untuk pendampingan,” katanya.

Ismed menjelaskan bahwa pendampingan itu di antaranya mencakup aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengembangan kemasan produk, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk.

Bahkan, PIP dan LKBB juga getol memberikan pendampingan pemasaran digital (*digital marketing*). Tujuannya, agar produk usaha ultra mikro dapat menjangkau pasar lebih luas sehingga meningkatkan peluang skala usahanya untuk meningkat.

“Pendampingan pelaku usaha ultra mikro oleh penyalur melalui pemberian motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur, dan bentuk lainnya,” ujarnya.

Pelaku UMi Intip Peluang Bisnis di Tahun Politik

Pemilu 2024 makin dekat dengan pelupuk mata. Momentum pesta demokrasi lima tahunan ini bisa menjadi berkah untuk berbagai sektor penopang perekonomian nasional, termasuk usaha mikro.

Alasannya karena di tahun politik lazim terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Situasi ini tentu menjadi peluang bagi UMKM untuk memaksimalkan peruntungan dan memanen lebih banyak cuan.

Hal tersebut, sebelumnya, turut diamini Bank Indonesia (BI). Menurut Deputi Gubernur Senior

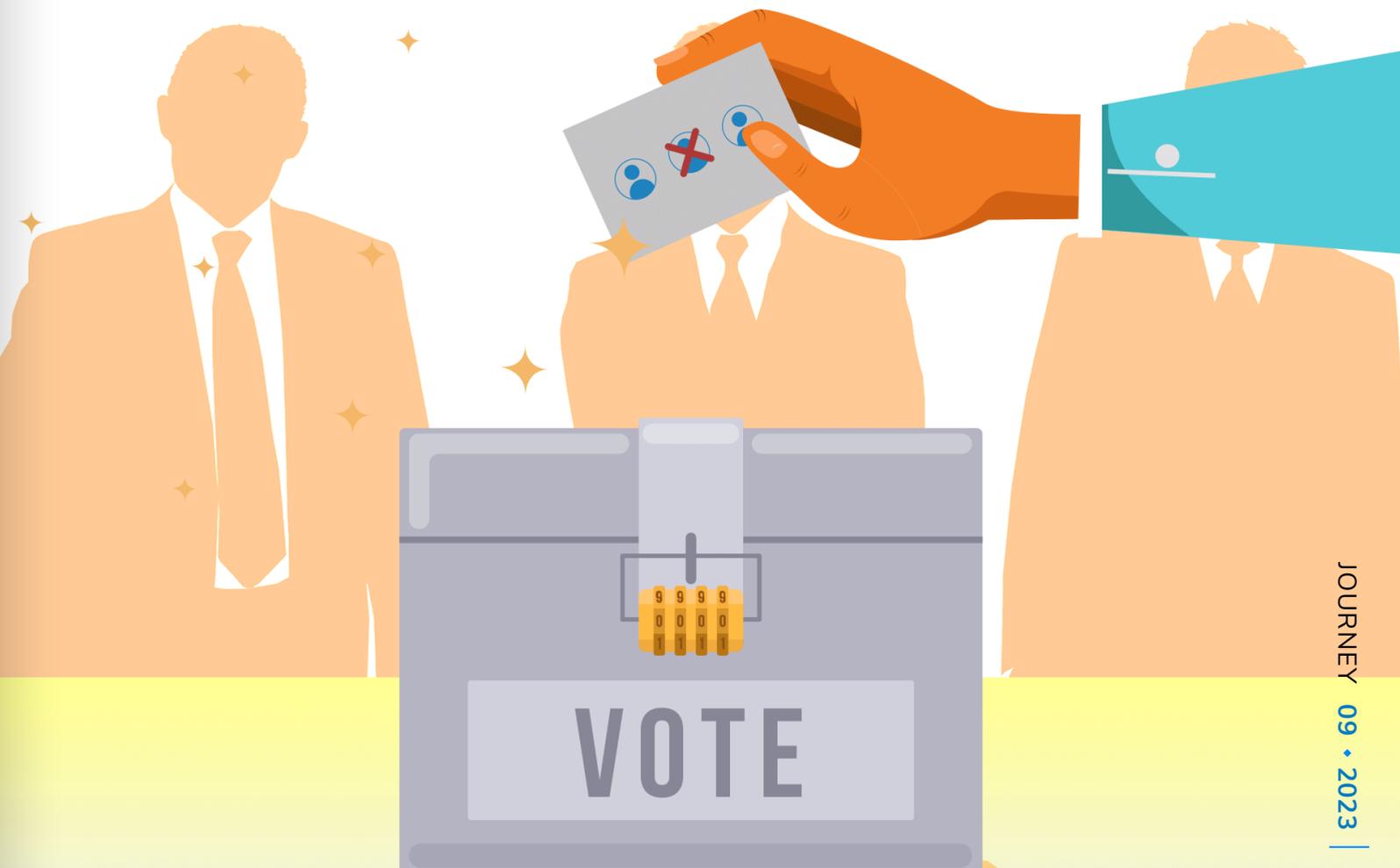
BI Destry Damayanti, pesta rakyat akan mendorong konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga nonprofit, sehingga menjadi akar kuat bagi perekonomian tahun depan.

Dan, UMKM berpotensi kecipratan berkah mengingat produk yang diproduksi UMKM amat dibutuhkan. “Inilah alasan kami melihat konsumsi masyarakat justru meningkat di masa Pemilu,” tuturnya.

Itu pula yang menjadi salah satu alasan BI mematok proyeksi

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 di kisaran 4,7% hingga 5,5% secara tahunan. Perkiraan pertumbuhan ini lebih tinggi dari *outlook* pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 4,5%-5,3% secara tahunan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mengingatkan bahwa pengusaha kecil tidak boleh lengah. Sebab dengan besarnya peluang, UMKM



Cara Menyusun Laporan Keuangan Akuntabel dengan Mudah



Saat ini, semakin banyak aplikasi maupun teknologi yang memudahkan pelaku usaha mikro menertibkan catatan keuangannya. Aplikasi ini tersedia gratis ataupun yang mensyaratkan menjadi mitra terlebih dahulu.

Salah satu aplikasi pencatatan keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) disediakan oleh Bank Indonesia (BI).

Dengan pencatatan berbasis digital ini, permasalahan pelaku UMKM yang kebanyakan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi dapat teratasi. Dukungan ini juga mengisi ruang dari pelaku UMKM hanya berfokus pada kegiatan *marketing* dan pengembangan produk saja.

Laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Laporan itulah yang menjadi dasar referensi perbankan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM.

Selain itu, tujuan lain SI APIK adalah meningkatkan akses keuangan, mendorong UMKM naik kelas, dan mendorong produktivitas UMKM. SI APIK memiliki lima fitur yakni standar, mudah, aman, sederhana, dan handal atau yang dikenal dengan istilah S-M-A-S-H.

SI APIK dapat digunakan untuk usaha perorangan dan badan usaha bukan badan hukum di sektor pertanian, jasa, perdagangan, manufaktur, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan peternakan. *Output*-nya adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan tren, dan laporan rasio keuangan.

SI APIK memiliki keunggulan karena menganut sistem *input single entry* menurut jenis transaksinya. Sistem ini mempermudah penggunaan aplikasi untuk mencatat dan menghasilkan laporan keuangan.

Standar pencatatan pada aplikasi SI APIK mengacu pada standar yang telah disusun oleh Bank Indonesia bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga sistem pencatatan pada aplikasi ini diakui dan diterima oleh lembaga keuangan.

Dengan demikian, laporan-laporan yang dihasilkan dari aplikasi ini juga bisa dijadikan sebagai landasan pengajuan pembiayaan kredit kepada lembaga keuangan.

Dalam aplikasi SI APIK, laporan keuangan dapat dilihat secara *real time* sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mengontrol kinerja usahanya. Juga tersedia fitur cetak atau ekspor laporan keuangan menjadi bentuk PDF atau excel.

Hal ini memberikan kemudahan pelaku UMKM untuk menyimpan data laporan keuangan baik secara *hard copy* maupun *soft copy*.

Pada menu laporan, terdapat beberapa *sub menu* yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pengguna SI APIK, utamanya untuk membantu melakukan analisis laporan keuangan usahanya.

Beberapa *sub menu* tersebut antara lain: laporan rincian, laporan *history* transaksi, laporan kinerja keuangan, laporan *trend* dan laporan analisis beban.

SI APIK juga dilengkapi dengan fitur *backup* dan *restore* untuk melindungi data transaksi keuangan

yang tidak sengaja terhapus, serta terdapat informasi cara penggunaan untuk mempermudah pengguna menginput data sesuai jenis transaksi.

Untuk menggunakan aplikasi SI APIK, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut di Playstore, kemudian langkah pertama yakni daftarkan terlebih dahulu usaha Anda melalui *form* yang telah disediakan.

Pada tahap pendaftaran, Anda akan diminta untuk memasukkan data seperti sektor usaha, nama

Cara Daftar dan *Login* Akun SI APIK

Untuk mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan SI APIK, Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ikuti panduan berikut ini:

1. Unduh dan buka aplikasi SI APIK.
2. Klik “Mulai Di sini” pada halaman pembuka, setelahnya setuju syarat & ketentuan.
3. Pilih salah satu sektor usaha Anda. Lalu klik “Selanjutnya”.
4. Isi informasi diri dan usaha.
5. Jika sudah, pilih periode awal transaksi yang akan dicatat di aplikasi SI APIK. Lalu, klik “Mulai Mengisi”.



badan usaha, alamat, nomor telepon, logo, dan pemilik. Selanjutnya, Anda juga akan diminta memilih periode awal transaksi yang akan dicatat di aplikasi SI APIK. Setelah tahap tersebut selesai, Anda telah berhasil mendaftarkan akun di SI APIK.

Tahapan selanjutnya yakni *login* ke akun Anda, dan mulai melakukan pencatatan pada *tab* penerimaan dan pengeluaran. Pada *tab* penerimaan ada beberapa jenis sumber yang bisa dipilih, demikian juga pada *tab* pengeluaran.

Cara Menggunakan Aplikasi SI APIK untuk Mencatat Penerimaan Uang

1. Buka aplikasi SI APIK dan *login* dengan akun terdaftar.
2. Pada tab Penerimaan, pilih sumber uang masuk.
3. Setelah itu, pilih salah satu jenis kegiatan usaha.
4. Masukkan data penjualan, klik “Simpan”.
5. Langkah yang mirip juga dilakukan untuk jenis pengeluaran.



Selamat Hari
Uang Nasional

30 OKTOBER



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN
BLU PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

MAKLUMAT LAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”